

**BAB II**

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA *SISTER CITIES* PEMERINTAH KOTA  
SURABAYA DALAM PENGEMBANGAN UMKM SELAMA PANDEMI  
COVID-19**

Dalam Bab ini, penulis membahas mengenai implementasi kerja sama *sister cities* Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan UMKM selama pandemi Covid-19 dengan beberapa sub bab pembahasan. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai profil Pemerintah Kota Surabaya, kondisi UMKM kota Surabaya selama pandemi covid-19 dan upaya-upaya Pemerintah kota Surabaya dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan UMKM di masa pandemi covid-19, riwayat paradiplomasi Kota Surabaya, dan implementasi kerja sama *sister cities* Pemerintah Kota Surabaya dengan lima mitra seperti Kitakyushu, Seattle, Gaziantep, Liverpool, dan Xiamen dalam pengembangan UMKM selama masa pandemi Covid-19.

**2.1 Profil Pemerintah Kota Surabaya**

Berkembangnya instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya sejarah. Pada awal abad ke-20 setelah diberlakukannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903, Pemerintah Kota

dibentuk sebagai bagian dari masa akhir kolonial Belanda.<sup>31</sup> Pada masa ini, terdapat perubahan yang sudah mulai terjadi pada Kota-Kota di Indonesia. Pembentukan sistem Pemerintahan Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada dasarnya hampir mirip dengan sistem Pemerintahan tradisional yang berlaku sebelumnya yakni pada masa pra kolonial. Dengan adanya hal ini, kolonial Belanda menggunakan Kota-Kota yang sudah ada untuk menjadi Ibu Kota Pemerintahan yang mereka bentuk.

*Decentralisatie Wet* 1903 menjadi undang-undang otonomi Pemerintah Daerah pertama yang dilegalkan di Indonesia. Peraturan teknis yang diperlukan untuk menjalankan *Decentralisatie Wet* 1903 diterbitkan dalam bentuk *Decentralisatie Besluit* 1905 dan *Lokal Raden Ordonnantie*. *Decentralisatie Besluit* 1905 yang memuat tentang pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan kewenangan dewan/Raad dalam mengelola keuangan yang dipisahkan dari Pemerintah pusat. *Lokal Raden Ordonnantie* menjadi aturan pelaksanaan yang menentukan struktur, status, kewenangan, dan pembentukan berbagai Raad yakni *Garcsteliikeraad*, *Plaatselijkraad*, dan *Gemeenteraad*.<sup>32</sup>

Dengan adanya pemberlakuan aturan dan undang-undang baru mengenai Pemerintah Daerah, maka Kota-Kota besar di Indonesia statusnya diubah menjadi Kota otonom dengan memenuhi persyaratan yang berlaku sehingga Kota-Kota besar ini memiliki Pemerintahan sendiri yang terpisah dengan Pemerintah pusat. Walaupun Kota-Kota ini memiliki kewenangan otonom, tetapi tetap bertanggung

---

<sup>31</sup> Purnawan Basundoro, 2012, Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012), ed.1, Yogyakarta: Elmatara Publishing, hal 1.

<sup>32</sup> Ibid.

jawab kepada Pemerintah pusat yakni gubernur jendral. Penyebutan Kota otonom pada masa colonial Belanda disebut dengan *Gemeente*. Penetapan ini kemudian menjadikan Kota-Kota besar di Indonesia ditetapkan sebagai *Gemeente* yang meliputi Batavia, Meester Cornelis (Jatinegara), Bogor (1905), Surabaya, Blitar, Pekalongan, Magelang, Kediri, Bandung (1906), Malang (1914), dan kemudian diikuti oleh Kota-Kota di Indonesia yang lainnya.<sup>33</sup>

Dengan tujuan melaksanakan undang-undang desentralisasi tahun 1903 yang sudah disahkan atau *Decentralisatie Wet 1903*, maka pada tanggal 1 April 1906 ditetapkannya Pemerintah Surabaya yang memiliki kekuasaan otonom dengan nama *Gemeente* Surabaya yang disahkan melalui *Steatsblad No. 149* Tahun 1906.<sup>34</sup> Di dalam *Steatsblad* dijelaskan bahwa Surabaya merupakan Kota mandiri yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mendanai sendiri pembiayaan Kotanya.

Hingga pada tahun 1916 atau sejak *Gemeente* Surabaya didirikan, Surabaya belum memiliki kepala Pemerintahan atau WaliKota dan kelengkapan organisasi. Dengan demikian, kewenangan untuk mengurus *Gemeente* diserahkan kepada Asisten Residen. Pada tahun 1916, barulah terjadi pengangkatan waliKota atau *burgemeester* dan pembentukan Lembaga *Gemeenteraad*. Sebelum dilaksanakannya pengangkatan atau penunjukan Wali Kota (*Burgemeester*) secara definitive, bagian lain dari struktur keorganisasian belum tersusun secara lengkap karena seluruh kegiatan operasional *burgemeester* masih mengikuti kegiatan operasional kantor keresidenan Surabaya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

Pada awal berdirinya *Gemeente* Surabaya, pengoperasian Pemerintahan masih berada di Gedung keresidenan Surabaya yang berada di Kawasan Williemsplein atau disekitar Jembatan Merah. Pada tahun 1923, *Gemeente* Surabaya baru memiliki Gedung sendiri yakni Gedung Balai Kota atau *stadshuis* yang hingga sekarang menjadi pusat Pemerintahan Kota Surabaya.

Setelah Indonesia merdeka dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada 27 Desember 1949, jabatan Wali Kota Surabaya secara sah diberikan kepada Doel Arnowo, salah seorang anggota Komite Nasional Indonesia. Penyebutan Pemerintah Kota Surabaya mengalami beberapa kali pergantian nama, Pemerintah Kota Surabaya pada awalnya bernama *Gemeente*, lalu *shi*, dan yang terakhir diubah menjadi Pemerintah Kota Besar Surabaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948.

Kota Surabaya merupakan Kota terbesar kedua di Indonesia dan menjadi pusat perdagangan wilayah Indonesia Timur. Kota Surabaya secara geografis terletak di 7°21' Lintang Selatan dan 112°36' sampai dengan 112°54' Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, wilayah Kota Surabaya memiliki daratan seluas sekitar 33.451,14 hektar dan wilayah lautnya mencakup sepertiga dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan informasi yang dipublikasikan dalam Surabaya Dalam Angka Tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surabaya, luas wilayah daratannya sekitar 32.681 hektar.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> "RPJMD 2021-2026,"

Wilayah administrasi Kota Surabaya dibagi menjadi 31 kecamatan dan 154 kelurahan. Di sebelah Selatan Kota Surabaya berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Gresik, di sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa dan selat Madura, serta di sebelah timur berbatasan langsung dengan selat Madura.<sup>37</sup>

Selain itu, sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki peran yang sangat strategis pada skala nasional dan regional. Dalam skala nasional, Kota Surabaya dijadikan sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia timur, dan dalam skala regional, Kota Surabaya menjadi Kota perdagangan dan jasa dengan berbagai pusat transportasi (darat, laut, dan udara). Dengan keadaan Kota Surabaya yang strategis inilah yang kemudian memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk dapat meningkatkan perannya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN). Pertumbuhan social, ekonomi, politik, dan budaya juga turut membawa pengaruh pada perkembangan Kota/kabupaten di sekitar Kota Surabaya.<sup>38</sup>

Dalam struktur pengorganisasian Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada peraturan Daerah yang berlaku. Sesuai dengan peraturan Daerah yang terbaru yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021, dalam melaksanakan dan menjalankan Pemerintahan Kota Surabaya dibagi ke dalam beberapa bagian atau lembaga yakni Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Bpk Jatim, Kota Surabaya, [jatim.bpk.go.id](https://jatim.bpk.go.id), diakses dalam <https://jatim.bpk.go.id/kota-surabaya/> (23/03/2024, 20.34 WIB)

<sup>38</sup> “RPJMD 2021-2026.”

<sup>39</sup> “Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021,” waliKota Surabaya provinsi Jawa Timur (2021).

Dalam konteks kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh sebuah Daerah, Pemerintah Kota Surabaya termasuk kedalam salah satu kota/Daerah yang memiliki struktur organisasi khusus untuk mengurus urusan luar negerinya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021, Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya memiliki tugas untuk melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi, fasilitasi Kerjasama dalam dan luar negeri, evaluasi Kerjasama dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>40</sup>

Tata kelola kerjasama luar negeri Kota Surabaya menekankan pentingnya konsultasi dengan Kementerian Dalam dan Luar Negeri. Sebelum mengambil langkah konkret dalam kerjasama internasional, Kota ini secara rutin berkoordinasi dengan instansi Pemerintah pusat untuk mendiskusikan rencana dan langkah-langkah yang akan diambil dalam Kerjasama luar negeri. Konsultasi ini menjadi landasan untuk menetapkan bidang-bidang prioritas yang akan menjadi fokus dalam kerjasama luar negeri, dan memastikan keselarasan antara kepentingan lokal dengan arah kebijakan nasional dalam skala internasional.

Selain konsultasi rutin dengan kementerian terkait, Kota Surabaya juga memiliki praktek evaluasi yang konsisten terhadap kerjasama luar negeri. Evaluasi ini diadakan setiap bulan dengan melibatkan akademisi dari Universitas Airlangga

---

<sup>40</sup> Ibid

(UNAIR), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.<sup>41</sup> Kolaborasi ini memungkinkan adanya analisis mendalam terhadap kinerja kerjasama luar negeri yang telah dilakukan serta membuka ruang untuk rekomendasi dan perbaikan yang diperlukan.

Keterlibatan akademisi dari berbagai universitas ternama di Surabaya dalam proses evaluasi kerjasama luar negeri menunjukkan komitmen Kota Surabaya untuk menerapkan pendekatan yang berbasis pada pengetahuan dan pengalaman terkini. Kolaborasi ini membantu dalam menganalisis efektivitas program serta dampaknya terhadap pembangunan lokal, dan memastikan bahwa kebijakan luar negeri Kota Surabaya didukung oleh penelitian dan analisis yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan manfaat dari setiap kerjasama internasional yang dilakukan.

## **2.2 Kondisi UMKM Kota Surabaya Selama Pandemi Covid-19**

Covid-19 hadir sebagai tantangan global yang harus dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia dari berbagai lapisan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi Covid-19 telah membawa dunia pada arus perubahan yang penuh ketidakpastian. Sejumlah kebijakan diterapkan diberbagai negara sebagai sebuah upaya untuk memerangi Covid-19. Penetapan pembatasan sosial seperti *lock down*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan *sosial distancing* menjadi langkah awal upaya Pemerintah dalam merespon tantangan global tersebut. Pembatasan-

---

<sup>41</sup> Wawancara penulis dengan Bu Sasha Syaifani, S.Hub.Int, Pegawai Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 28 Desember 2023.

pembatasan tersebut dalam aktivitas masyarakat cenderung mempengaruhi kondisi ekonomi global dan nasional.<sup>42</sup> Dengan demikian, hal tersebut telah berdampak pada keberlanjutan sektor bisnis dan perdagangan.

Sebagai Kota terbesar kedua di Indonesia, Kota Surabaya memiliki UMKM sebanyak 60.007 UMKM, diantaranya sebanyak 13.441 UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Surabaya dan sebanyak 45.566 UMKM terdaftar di kecamatan yang ada di wilayah Kota Surabaya pada tahun 2021.<sup>43</sup> Dengan jumlah UMKM Kota Surabaya yang mencapai angka 60 ribu lebih, mengharuskan UMKM lokal berhadapan dengan tantangan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan dan pola pikir manusia yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pandemi Covid-19.

Keberadaan pandemi Covid-19 berdampak sangat signifikan pada laju penjualan produk UMKM hingga menempatkan UMKM Kota Surabaya pada kondisi yang sangat terpuruk.<sup>44</sup> UMKM Kota Surabaya mengalami penurunan omset akibat penurunan penjualan, sulitnya akses pemasaran, permodalan, dan kesulitan memperoleh bahan baku mentah. Dalam situasi tersebut, terjadi penyusutan yang signifikan pada sektor UMKM lokal padahal sektor tersebut

---

<sup>42</sup> Mochamad Ilham Ramadhani, Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pemulihan Ekonomi Ukm Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus: Dinas Koperasi Kota Surabaya), Seminar Nasional Ilmu Terapan (SNITER) , 2022, E281–89, hal 281.

<sup>43</sup> Pemerintah Kota Surabaya, UMKM Surabaya Capai 60 Ribu Lebih, Ini Intervensi Pemkot Surabaya, surabaya.go.id, diakses dalam [https://surabaya.go.id/id/berita/60749/umkm-surabaya-capai- \(01/04/2024, 13.22\).](https://surabaya.go.id/id/berita/60749/umkm-surabaya-capai- (01/04/2024, 13.22).)

<sup>44</sup> Wawancara Penulis Dengan Bu Mega Pegawai Dinas Koperasi Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya, 5 April 2024.

menjadi penyumbang pemasukan Daerah sekitar 90% dari perekonomian Kota Surabaya.<sup>45</sup>

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM Kota Surabaya selama pandemi Covid-19 secara garis besar berada pada akses pemasaran dan permodalan. Kesulitan tersebut dialami oleh seluruh pelaku UMKM baik dari pedagang toko kelontong, pengrajin, maupun usaha kuliner di Kota Surabaya.<sup>46</sup> Pemerintah Kota Surabaya dan Dinkopum Surabaya melakukan berbagai upaya agar UMKM lokal dapat bertahan dan berkembang di tengah pandemi Covid-19 dengan kondisi yang sedang dihadapinya.

Dalam membantu UMKM untuk bertahan di tengah kondisi pandemi, Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan kualitas produk UMKM. Penerapan ekonomi kerakyatan digunakan dengan maksud bahwa seluruh kebutuhan di Kota Surabaya akan dipenuhi oleh produk-produk UMKM. Kebutuhan batik dan seragam Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan siswa Tingkat SD-SMP Kota Surabaya merupakan produk UMKM lokal Kota Surabaya sendiri.<sup>47</sup>

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga membantu para UMKM untuk beralih memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana pemasaran. Seiring dengan adanya penurunan ekonomi yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19, pola

---

<sup>45</sup> Abdul Hakim, Akses Pemasaran Dan Permodalan Jadi Kendala UMKM Di Kota Surabaya, *jatim.antaranews.com*, diakses dalam <https://jatim.antaranews.com/berita/555013/akses-pemasaran-dan-permodalan-jadi-kendala-umkm-di-kota-surabaya> (01/04/2024, 15,47 WIB).

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Dari Program Umkm Hingga Padat Karya, Strategi Wali Kota Eri Cahyadi Bangkitkan Ekonomi Surabaya, *surabaya.go.id*, diakses dalam <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65672/dari-program-umkm-hingga-padat> (01/04/2024, 18,56 WIB)

transaksi dalam pemasaran mengalami transformasi dari pendekatan konvensional ke digital.<sup>48</sup> Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan salah satunya adalah penggunaan teknologi dan keberadaan digitalisasi.

Walaupun UMKM Kota Surabaya mengalami penyusutan omset yang diakibatkan dari adanya kesulitan pemasaran produk, namun tetap terdapat UMKM yang mengalami kenaikan omset terutama di bidang makanan atau kuliner. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran produk dilakukan secara daring melalui *e-commerce* sehingga dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya saat di rumah saja selama pandemi Covid-19.<sup>49</sup> Dari pihak Pemerintah Kota Surabaya juga turut secara rutin memberikan pelatihan dan pendampingan pada pelaku UMKM lokal dalam mengembangkan usaha mereka melalui digitalisasi.

Pembangunan Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai relokasi UMKM yang terdampak dari adanya pembangunan, menjadi wujud pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait sektor UMKM. Selama masa pandemi, seluruh pelaku UMKM yang berada di area SWK dibebaskan biaya retribusi selama tiga bulan dengan tujuan agar roda perekonomian para pedagang tetap berputar. Hal ini disebabkan karena penurunan omset yang dialami para pedagang karena adanya PSBB yang mana para pedagang di SWK tidak

---

<sup>48</sup> Izzatira Akbhari and Ananta Prathama, Inovasi Aplikasi E-Peken : Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya, *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023): 396–409, <https://doi.org/10.52423/neores.v4i2.90>

<sup>49</sup> tim detik.com, Banyak UMKM Di Surabaya Yang Omzetnya Meroket Selama Pandemi COVID-19, *detik.com*, diakses dalam <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-5906271/banyak-umkm-di-surabaya-yang-omzetnya-meroket-selama-pandemi-Covid-19> (01/04/2024, 20.37 WIB)

diperbolehkan menerima pembeli ditempat.<sup>50</sup> Dengan demikian, sistem penjualan di SWK dilakukan secara *take away*. Seiring dengan berjalannya waktu, penjualan para pedagang di SWK mengalami kenaikan omset. Pada bulan juli 2020, para pedagang di SWK telah diperbolehkan untuk dapat melayani pembeli di tempat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan.

Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Surabaya melalui ekonomi lokal yakni UMKM, Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan platform digital seperti *e-commerce* untuk memasarkan produk-produk UMKM Kota Surabaya. Platform digital tersebut berupa aplikasi *e-peken Surabaya* yang terdiri dari 500 pedagang toko kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok.<sup>51</sup> WaliKota Surabaya yakni Eri Cahyadi, menegaskan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di wilayah Pemerintah Kota Surabaya untuk membeli bahan kebutuhan pokok setiap bulannya di aplikasi *e-peken Surabaya*. Hal ini dilakukan agar terjadi perputaran perekonomian Daerah melalui UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal. Hingga April 2024, terhitung ada sekitar 107.484 produk UMKM lokal Kota Surabaya yang dijual di aplikasi *e-peken Surabaya*.

Mengembangkan potensi ekonomi Kota Surabaya di tingkat internasional juga menjadi salah satu misi pembangunan Kota Surabaya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Salah satu

---

<sup>50</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Strategi Pemkot Agar Umkm di Surabaya Mampu Hadapi Krisis Di Masa Pandemi, [surabaya.go.id](https://surabaya.go.id/id/berita/56780/strategi-pemkot-agar-umkm-di-su), diakses dalam <https://surabaya.go.id/id/berita/56780/strategi-pemkot-agar-umkm-di-su> (01/04/2024, 21.53 WIB)

<sup>51</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Dari Program Umkm Hingga Padat Karya, Strategi Wali Kota Eri Cahyadi Bangkitkan Ekonomi Surabaya, [surabaya.go.id](https://www.surabaya.go.id/id/berita/65672/dari-program-umkm-hingga-padat), diakses dalam <https://www.surabaya.go.id/id/berita/65672/dari-program-umkm-hingga-padat> (01/04/2024, 23.54)

tujuan utama pentingnya merencanakan pembangunan Daerah adalah untuk memperkuat kemajuan ekonomi.<sup>52</sup> Di era globalisasi, perkembangan ekonomi dan perdagangan didorong oleh infrastruktur yang memadai sehingga memungkinkan adanya aktivitas perdagangan lintas batas negara yang berlangsung dengan cepat. Kemajuan dalam teknologi komunikasi dan biaya transportasi yang semakin murah berperan sebagai pendorong utama globalisasi ekonomi dan perdagangan saat ini.<sup>53</sup>

Dalam upaya untuk membangkitkan perekonomian UMKM Kota Surabaya dari pandemi, Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Surabaya untuk pengembangan UMKM lokal di tingkat internasional terutama selama masa pandemi Covid-19. Tugas Dinkopdag dalam kerja sama ini adalah melakukan pemberdayaan UMKM dengan memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi para UMKM yang produknya akan dikirimkan ke mitra *sister cities*.<sup>54</sup> Upaya tersebut direalisasikan dengan memanfaatkan kerja sama *sister city* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan sejumlah produk-produk UMKM unggulan Kota Surabaya ke berbagai mitra *sister cities* seperti Seattle, Kitakyushu, Liverpool, dan Gaziantep, serta melakukan pelatihan bisnis digital bagi para OPD terkait dengan menggandeng mitra *sister city* Xiamen. Upaya ini ditujukan sebagai media promosi UMKM lokal di tingkat internasional melalui mitra-mitra *sister city* Pemerintah Kota Surabaya, yang mana diharapkan dapat

---

<sup>52</sup> Djoko Sudantoko, 2003, Dilema Otonomi Daerah, ed.1, Yogyakarta: Andi, hal 101.

<sup>53</sup> Budi Winarno, 2014, Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer, ed.1, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service), hal 28

<sup>54</sup> Wawancara Penulis Dengan Bu Mega Pegawai Dinas Koperasi Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya, 5 April 2024.

memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan UMKM lokal di pasar internasional selama masa pandemi Covid-19.

### **2.3 Riwayat Paradiplomasi Kota Surabaya**

Penyerahan urusan Pemerintahan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada asas otonomi diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintahan Daerah dalam pembangunan Daerah diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pemberlakuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan Pemerintah Daerah ruang untuk melakukan Kerja sama luar negeri telah membuktikan bahwa globalisasi telah melahirkan aktor-aktor baru dalam dunia internasional. Pemerintah Daerah menjadi salah satu entitas baru aktor sub state yang memiliki peran penting dalam pembangunan Daerah melalui kerja sama luar negeri atau biasa disebut dengan paradiplomasi.<sup>55</sup>

Kuznetsov menjelaskan bahwa paradiplomasi adalah sebuah bentuk komunikasi politik untuk mencapai keuntungan ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya yang terdiri dari tindakan swadaya Pemerintah Daerah dengan Pemerintah asing dan non aktor Pemerintah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Septy Farina Ayu FL, 2007, Hubungan Kerjasama Sister city Surabaya-Kochi (1997-2006), Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga, hal. 9.

<sup>56</sup> Jorge Schiavon, 2018, Comparative Paradiplomacy, United Kingdom: Taylor & Francis, [https://www.google.co.id/books/edition/Comparative\\_Paradiplomacy/V4V7DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PT12&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Comparative_Paradiplomacy/V4V7DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PT12&printsec=frontcover).

Dengan adanya desentralisasi, Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang kuat dalam melaksanakan aktivitas paradiplomasinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya aspek yuridis yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalin kerja sama luar negerinya. Dengan demikian ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.<sup>57</sup>

Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 menetapkan 11 prosedur yang harus dilewati oleh Pemerintah Daerah dalam menjalin Kerja sama dengan pihak luar negeri yakni prakarsa, penjajakan, penandatanganan *Letter of Intent (LoI)*, penyusunan rencana kerja sama, persetujuan dari DPRD setempat, permintaan fasilitas Pemerintah, perencanaan penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*, penandatanganan MoU, pelaksanaan MoU, evaluasi pelaksanaan kerja sama, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam menjalin kerja sama luar negeri, Pemerintah Daerah diwajibkan melibatkan Pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, DPRD Kota/Kabupaten, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020.<sup>58</sup>

Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat Kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: a) mempunyai hubungan diplomatic; b) urusan Pemerintah Daerah; c) Pemerintah

---

<sup>57</sup> “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 25 Tahun 2020 Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Lembaga Di Luar Negeri” (N.D.), [Www.Peraturan.Go.Id](http://www.peraturan.go.id).

<sup>58</sup> Ibid.

Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; d) Pemerintah Daerah dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan Pemerintah dalam negeri; e) sesuai dengan kebijakan dan rencana Pembangunan nasional dan Daerah; f) kesetaraan status administrasi; g) saling melengkapi dan; h) peningkatan hubungan antar Masyarakat.<sup>59</sup>

Dalam konteks Kerja sama Daerah dengan Pemerintah di luar negeri (KSDPL), terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yakni kesetaraan status administrasi; saling melengkapi; dan peningkatan hubungan antar Masyarakat. Adapun alur atau tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan KSDPL meliputi a) prakarsa; b) peninjauan; c) pernyataan kehendak Kerja sama; d) penyusunan rencana Kerja sama; e) persetujuan DPRD; f) verifikasi; g) penyusunan rancangan naskah Kerja sama; h) pembahasan naskah Kerja sama; i) persetujuan Menteri; j) penandatanganan naskah Kerja sama; dan k) pelaksanaan.<sup>60</sup>

Hingga saat ini, Kota Surabaya memiliki kerja sama *sister city* dengan 14 Kota di luar negeri dan 5 kerja sama dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama *sister city* dengan 14 Kota di luar negeri meliputi Seattle; Busan; Izmir; Kochi; Monterey; Guangzhou; Xiamen; Marseille; Shah Alam; Varna; Jiangmen; Kitakyushu; Liverpool; dan Gaziantep. Sedangkan Kerja sama yang terjalin dengan Lembaga di luar negeri meliputi *United Cities And Lokal Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)*; *Tourism Promotion Organization (TPO)*; *Citynet*; *Strong Cities*

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

*Network*; dan *Japan Council Of Lokal Authorities For International Relations (J.CLAIR)*.<sup>61</sup>

Sejarah paradiplomasi Kota Surabaya dimulai pada tahun 1992 melalui kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Seattle, Amerika Serikat. Kerja sama tersebut disahkan dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang dilaksanakan pada 27 September 1992. Kerja sama ini dilaksanakan di bidang manajemen perkotaan; manajemen pelabuhan; perlindungan lingkungan hidup; pendidikan; kesenian dan kebudayaan; IPTEK; dan pengembangan dunia usaha. Pada tahun yang sama, dibentuk sebuah asosiasi yang ditujukan untuk memfasilitasi pertukaran kerja sama diantara kedua kota yakni Seattle-Surabaya Sister City Association (SSSCA).<sup>62</sup> Program pertama yang dilaksanakan sebagai wujud kerja sama ini adalah melakukan pertukaran pendidikan antara dosen dari University of Washington dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memberikan materi perkuliahan di bidang riset fisika nuklir

Perjalanan paradiplomasi kedua yang dimiliki oleh Kota Surabaya adalah kerja sama *sister city* dengan Pemerintah Kota Busan, Korea Selatan. Kerja sama kedua Kota ini ditandai dengan penandatanganan MoU pada 10 November 1994. Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Busan melakukan pengiriman delegasi pendidikan Busan ke Kota Surabaya yang dilaksanakan setiap tahun hingga tahun

---

<sup>61</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 08 Desember 2023.

<sup>62</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya Terima Tamu Dari Seattle-Surabaya Sister City Association, [hukumdankerjasama.surabaya.go.id](https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id), diakses dalam [https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2018/05/Pemerintah-kota-surabaya-terima-tamu-dari-seattle-surabaya-sister-city-association/#:~:text=Kerjasama%20sister%20city%20antara%20Kota,\(7\)%20pengembangan%20unia%20usaha](https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2018/05/Pemerintah-kota-surabaya-terima-tamu-dari-seattle-surabaya-sister-city-association/#:~:text=Kerjasama%20sister%20city%20antara%20Kota,(7)%20pengembangan%20unia%20usaha) (18/04/2024, 13.45 WIB)

2019. Pengiriman delegasi ini dilakukan sebagai bentuk program kerja sama *sister city* Surabaya-Busan untuk mengikuti kegiatan “Student Exchange Program”.

Ketiga, Pemerintah Kota Surabaya menjalain kerja sama *sister city* dengan Izmir, Turki. Kerja sama kedua Kota ini ditandai dengan penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* pada 1 September 1995. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama ini meliputi kunjungan delegasi Kota Surabaya ke Kota Izmir dalam rangka diskusi terkait informasi bidang kebudayaan dan pengiriman desain patung suro-boyo yang rencananya akan dibangun sebagai simbol kerja sama kedua Kota di Taman Persahabatan Izmir. Namun, selama 7 tahun terakhir tidak terdapat kegiatan kerja sama lebih lanjut dan belum dilaksanakan revitalisasi kerja sama antara Kota Surabaya dengan Kota Izmir.

Keempat, kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Kochi, Jepang yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada tahun 1997. Mulai tahun 1998 hingga 2019, Pemerintah Kota Surabaya secara aktif mengirimkan satu staf Pemerintahan untuk mengikuti program magang *Local Government Official Training Program (LGOTP)* yang diselenggarakan setiap tahun selama satu bulan di Kota Kochi. Hubungan kerja sama kedua Kota ini masih terus terjalin dengan baik melalui pelaksanaan berbagai program kerja sama yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Kelima, Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Monterrey, Meksiko yang ditandai dengan adanya kesepakatan kerja sama dalam bentuk MoU pada tahun 2001. Pada tahun 2015 dilaksanakan kunjungan delegasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Meksiko dan Konsul

Kehormatan Indonesia di Monterrey ke Surabaya dalam rangka merevitalisasi kerja sama *sister city* kedua Kota tersebut. Namun hingga kepemimpinan waliKota Eri Cahyadi masih belum terdapat pembicaraan lebih lanjut terkait hasil revitalisasi kerja sama kedua kota.

Keenam, kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou, Tiongkok yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada tahun 2005. Kerja sama kedua Kota ini dapat dikatakan sebagai kerja sama aktif yang dimiliki oleh Kota Surabaya karena setiap tahunnya terdapat berbagai program kerja sama yang dilaksanakan. Pada 15 september 2022, Pemerintah Kota Guangzhou mengirimkan bantuan masker medis sebanyak 40.000 pcs untuk Kota Surabaya sebagai usaha pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Pengiriman bantuan yang diberikan oleh Kota Guangzhou kepada Kota Surabaya ini telah membuktikan hubungan kerja sama yang erat antara kedua kota.

Riwayat paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya yang ketujuh yakni menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Xiamen, Tiongkok yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 23 Juni 2006. Walaupun pada tahun 2021 terjadi pandemi Covid-19, yang mana pada saat itu terjadi pembatasan ruang gerak aktivitas masyarakat namun kedua Kota ini secara aktif melakukan berbagai program atau kegiatan secara daring sebagai wujud kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dengan Kota Xiamen. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah pertukaran bahasa dan budaya China dari Pemerintah Kota Xiamen yang dilakukan melalui kelas daring Rumah Bahasa Surabaya.

Kedelapan, Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Marseille, Perancis. Kerja sama ini disahkan dengan penandatanganan LoI pada tahun 2007. Namun, kegiatan kerja sama kedua Kota ini belum terdapat revitalisasi lebih lanjut. Selanjutnya, pada 22 Mei 2009 Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Shah Alam, Malaysia melakukan penandatanganan kerja sama dalam bentuk LoI. Kerja sama kedua Kota ini meliputi bidang perencanaan kota; kebudayaan dan pariwisata; pemuda dan olahraga. Namun, kerja sama kedua Kota ini terhenti karena mengalami hambatan akibat adanya pembatasan kewenangan Pemerintah Daerah di Malaysia untuk melaksanakan kerja sama internasional dan belum dilakukan revitalisasi kembali.

Kesepuluh, Pemerintah Kota Surabaya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Varna, Bulgaria yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada tahun 2010. Kerja sama kedua Kota ini berjalan di bidang ekonomi; industri; perdagangan; pendidikan dan IPTEK; transportasi; kesehatan; kebudayaan, kesenian dan pariwisata. Kerja sama kedua Kota ini terhitung sebagai kerja sama luar negeri Pemerintah Kota Surabaya yang belum direvitalisasikan kembali. Walaupun belum terdapat revitalisasi lebih lanjut terkait kerja sama *sister city*, namun kedua Kota masih saling berkomunikasi dan menjaga hubungan baik. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengiriman video pesan dan sambutan WaliKota Surabaya sebagai bentuk ucapan ulang tahun Kota Varna yang ke-100 tahun sebagai destinasi wisata dunia.

Kesebelas, terdapat paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Jiangmen, Tiongkok yang ditandai dengan penandatanganan LoI

pada 30 Mei 2012. Bidang yang dikerjasamakan antara kedua Kota ini meliputi ekonomi dan perdagangan; kebudayaan; pariwisata; pendidikan. Pada 12 Juli 2018, delegasi kesenian Kota Jiangmen berpartisipasi dalam kegiatan *Surabaya Cross Culture Festival*. Kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Jiangmen digolongkan sebagai kerja sama luar negeri Kota Surabaya yang belum direvitalisasi kembali karena belum terdapat program kerja sama lebih lanjut yang dilakukan setelah tahun 2018.

Riwayat paradiplomasi yang kedua belas yakni kerja sama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang. Fakta menariknya, kerja sama kedua Kota ini sudah terjalin di tahun 1997 yang ditandai dengan penandatanganan *Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation Among Cities in Asian Region*, namun kedua Kota ini baru melakukan kesepakatan kerja sama dalam bentuk MoU pada tahun 2012. Kerja sama kedua Kota ini merupakan kerjasama aktif yang dimiliki oleh Kota Surabaya dan telah membawa manfaat besar bagi Kota Surabaya dalam mewujudkan *Green City*. Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu telah merancang sejumlah program yang ditujukan untuk mewujudkan *Green Sister city Surabaya Kitakyushu*. Program-program tersebut meliputi Konsep Kota Rendah Karbon Dan Program Daur Ulang; Manajemen Air; Eksplorasi Potensi Kota; Pengolahan Air Bersih; Manajemen Energi; Pencegahan Demam Berdarah; Konservasi Hutan; dan Pengembangan Ekowisata.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Fany Widiana dan Ario Bimo Utomo, Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu, *Jurnal Transformasi Global* 8, no. 1 (2021), Malang: Universitas Brawijaya, hal 90.

Selanjutnya, terdapat riwayat paradiplomasi yang ketiga belas yakni kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Liverpool, Inggris. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU pada 19 Maret 2018. Kesepakatan kerja sama kedua Kota ini meliputi pengembangan ekonomi kreatif; manajemen pelabuhan; pengembangan Kota pintar; dan pengembangan kapasitas SDM. Salah satu *best practice* yang dihasilkan dari kerja sama kedua Kota ini adalah pengiriman delegasi sepak bola U14 Kota Surabaya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh *Tranmere Rovers Football Club (TRCF) Liverpool*.

Riwayat paradiplomasi keempat belas terdapat kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Gaziantep, Turki. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU pada 27 April 2021. Kerja sama *sister city* dengan Gaziantep merupakan kerja sama terbaru yang dimiliki oleh Kota Surabaya. Kerja sama ini terjalin karena terdapat persamaan hubungan antara WaliKota Surabaya dan WaliKota Gaziantep yang dipimpin oleh dua WaliKota perempuan, sehingga hal tersebut mendorong terjalinnya kerja sama *sister city*.<sup>64</sup>

Selain memiliki riwayat paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city*, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki 5 kerja sama dengan lembaga di luar negeri. Lembaga luar negeri pertama yang menjadi mitra Kota Surabaya adalah *United Cities And Local Government Asia Pacific (UCLG ASPAC)*. Pada tahun 2018, Kota Surabaya berkesempatan untuk menjadi tuan rumah Kongres UCLG ASPAC ke-7 yang dilaksanakan pada 11-15 September 2018. UCLG ASPAC

---

<sup>64</sup> Fitria Nur Cholifah, 2023, Kerja Sama Sister city Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Gaziantep Dalam Inisiasi Pengembangan Ekonomi Lokal, Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hal.5.

merupakan sebuah asosiasi untuk badan Pemerintah Daerah yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berpusat di Barcelona. Tujuan utama didirikannya asosiasi ini adalah untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya untuk pembangunan wilayah mereka. Dalam acara tersebut, Kota Surabaya memilih tema “Pembangunan Inovasi untuk Kota Berkelanjutan”.

Pada 22 November 2023, Kota Surabaya berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam forum yang diadakan oleh *UCLG ASPAC* dalam acara “Rapat Bimbingan Teknis Mengembangkan Kerja Sama Luar Negeri bagi Daerah”. Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari setiap Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan untuk memberikan bimbingan kepada Pemerintah Daerah di Indonesia agar memulai aktivitas paradiplomasi yang diharapkan dapat membantu pengembangan Daerah di Indonesia.

Kota Surabaya menjalin hubungan kerja sama dengan organisasi *Tourism Promotion Organization (TPO)* pada tahun 2007. *TPO* merupakan organisasi internasional yang didirikan pada 31 Agustus 2002. Sebagai organisasi yang berfokus pada jaringan antar kota, *TPO* berperan dalam mendorong pertukaran dan kemajuan industri pariwisata di berbagai kota, khususnya di wilayah Asia Pasifik.<sup>65</sup> Dengan bergabungnya Kota Surabaya dalam bagian anggota *TPO*, diharapkan dapat memperkuat koneksi Kota Surabaya dalam dunia industri pariwisata yang secara khusus akan membantu memperluas pengetahuan global tentang Kota tersebut. Selain itu, hal tersebut akan membuka peluang yang lebih luas bagi

---

<sup>65</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Risma Diusulkan Jadi Presiden Organisasi Promosi Pariwisata Asia Pasifik, [surabaya.go.id](https://www.surabaya.go.id), diakses dalam <https://www.surabaya.go.id/id/agenda/50380/wali-kota-risma-diusulkan-jadi> (28/03/2024, 14.22 WIB).

investasi terutama di sektor pariwisata. Dengan demikian profil Kota Surabaya dalam sektor pariwisata akan meningkat di mata dunia. Namun, kerja sama yang terjalin antara Kota Surabaya dan *TPO* belum terlaksana dengan optimal sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut lagi terkait keberlangsungan kerja sama kedua belah pihak.

Sejak tahun 2007, Kota Surabaya telah menjadi anggota aktif dalam asosiasi *CityNet* dan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai studi kasus tentang praktik perkotaan. *CityNet* adalah sebuah asosiasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memajukan pembangunan Kota yang berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik. Saat ini, *CityNet* memiliki 154 anggota yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk kota, provinsi, sektor non-Pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga penelitian.<sup>66</sup>

Selain itu, Surabaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat kepala Daerah se-Asia Pasifik dengan tema "*Paving the Way Towards Enviromentaslly Sustainable Cities*". Seminar dan pertemuan antarwaliKota ini diselenggarakan oleh *CityNet* pada tanggal 9-12 Juli 2012. Acara tersebut dihadiri oleh 700 kepala Daerah se-Asia Pasifik.<sup>67</sup> Pada 22 Agustus 2023, delegasi *CityNet* melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Surabaya untuk membicarakan mengenai rencana program yang akan melibatkan Kota Surabaya dan *CityNet* dalam waktu yang akan datang.

---

<sup>66</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Kunjungan Delegasi *CityNet*, [hukumdankerjasama.surabaya.go.id](https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id), diakses dalam <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2023/08/kunjungan-delegasi-citynet/> (28/03/2024, 16.23)

<sup>67</sup> Ibid.

Sejak tahun 2021, Kota Surabaya telah bergabung kedalam anggota *Strong Cities Network*. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang timbul dari aksi terorisme dan esktrimisme.

Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga menjadi keanggotaan *Japan Council Of Local Authorities For International Relations (J.CLAIR)*. *J.CLAIR* merupakan sebuah asosiasi Pemerintah Daerah di Jepang yang didirikan pada Juli 1988. Tujuan asosiasi ini didirikan adalah untuk mendukung dan mempromosikan program-program internasional dan lokal di Indonesia dan Jepang. *J.CLAIR* berkantor pusat di Sogo Hanzomon Building, Tokyo, dan memiliki kantor perwakilan di Singapura, New York, London, Paris, Seoul, Sydney, dan Beijing. Di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, *J.CLAIR* telah menjalankan program-program sejak tahun 2009 hingga 2015.

Kegiatan tersebut melibatkan pengiriman tenaga ahli dari Jepang ke Kota Surabaya untuk pertukaran informasi tentang manajemen drainase, penanganan bencana, dan pengelolaan limbah. Pada 30 Juni 2022, *J.CLAIR* melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penelitian lapangan langsung tentang bagaimana pelayanan publik di Kota Surabaya dalam hal pelayanan pajak, dan penyelenggaraan administrasi publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Pemerintah Kota Surabaya, Penerimaan Rangkaian Kunjungan Delegasi J-CLAIR Singapore, [hukumdankerjasama.surabaya.go.id](https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id), diakses dalam <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2022/06/penerimaan-rangkaian-kunjungan-delegasi-j-clair-singapore/> (28/03/2024, 15.59 WIB)

Dengan banyaknya riwayat paradiplomasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1992 baik itu dalam bentuk KSDPL atau KSDLL dengan berbagai program-program kerjasama di berbagai bidang, tentunya hal tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Surabaya menuju Kota dunia. Selain itu, Kota Surabaya memiliki sejumlah *best practices paradiplomacy* melalui kerja sama *sister city* dengan beberapa mitra luar negerinya seperti:<sup>69</sup>

1. Kitakyushu, Jepang. *Best practices* program kerja sama *sister city* ini meliputi pengomposan yang dilakukan oleh masyarakat dengan metode Takakura; pembangunan Super Depo Sutorejo dan Rumah Kompos Wonorejo; dan workshop pengelolaan sampah;
2. Kochi, Jepang. Kerja sama *sister city* ini dilaksanakan dengan sejumlah program seperti pengiriman staff Pemerintah Kota Surabaya untuk mengikuti program magang *Local Government Officials Training Program (LGOTP)* yang dilaksanakan setiap tahun selama satu bulan di Kota Kochi; pengiriman gamelan ke Pemerintah Kochi; dan pendidikan gamelan untuk siswa SD *Haruno Higashi* di Kochi;
3. Busan, Korea Selatan. Dalam kerja sama *sister city* antara kedua Kota ini terdapat sejumlah *best practices* yang meliputi pelatihan tenaga pendidik Kota Surabaya dengan *Dong-eui University; 2023 Invitational Training*

---

<sup>69</sup> Wawancara Dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 08 Desember 2023..

*Program For Busan's Sister cities-Green Smart City Capacity Building, Funded by Busan Global City Foundatiom (BGCF);*

4. Guangzhou, Tiongkok. *Best practice* kerja sama kedua Kota ini berupa workshop pengembangan perpustakaan;
5. Xiamen, Tiongkok. Kerja sama kedua Kota ini telah memberikan *best practices* berupa workshop pengembangan museum, dan *friendly cultural program Xiamen*.

Dengan sejumlah *best practices paradiplomacy* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya, tentunya tidak terlepas dari adanya upaya dan strategi untuk mempertahankan hubungan kerja sama internasional yang telah dijalin oleh aktor non negara yakni Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, strategi Kota Surabaya untuk mempertahankan hubungan luar negerinya, meliputi<sup>70</sup>:

1. Patuh terhadap peraturan, Pemerintah Daerah dianggap sebagai representasi atau ekstensi dari Pemerintah pusat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan yang ada menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan paradiplomasi Kota Surabaya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi peraturan menteri dalam negeri no.25 tahun 2020; undang-undang no. 23 tahun 2014; peraturan Pemerintah no 10. Tahun 2011. Dengan adanya peraturan-peraturan yang mengikat, setiap Pemerintah Daerah diupayakan untuk dapat menginformasikan kepada mitra terkait peraturan yang berlaku di tingkat nasional dan Daerah. Hal ini menjadi langkah awal keterbukaan terkait

---

<sup>70</sup> Ibid.

sistem birokrasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan luar negerinya.

2. Melibatkan stakeholder, secara teratur berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kerja sama yang efisien. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya selalu melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan para akademisi untuk berkonsultasi terkait kerja sama. Selain itu, penting untuk menggali data atau informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta website mengenai profil Kota yang menawarkan kerja sama. Pemerintah Kota Surabaya juga secara rutin melakukan monitoring evaluasi kerja sama yang dimilikinya secara berkala dengan melibatkan para akademisi.
3. Protokol, penting untuk memahami dinamika hubungan internasional Republik Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan menjalankan konsultasi dan koordinasi secara aktif guna mencapai kerja sama yang efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset terkait isu-isu global maupun isu-isu nasional negara mitra *sister city* seperti melakukan riset lebih dalam untuk mengetahui status negara mitra *sister city* yang diakui oleh republik Indonesia, posisi negara mitra *sister city* di dunia saat ini apakah terlibat dalam peperangan atau gerakan-gerakan yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.
4. Strategi komunikasi menjadi strategi terpenting dalam menjalin hubungan dengan entitas asing. Strategi ini dapat berupa menghargai perbedaan waktu

dan segera temukan titik temu dengan mitra; menggunakan media yang tepat untuk berkomunikasi sesuai dengan yang biasa digunakan mitra;gunakan jasa penerjemah apabila diperlukan terutama untuk bahasa asing selain bahasa inggris; dan jalin silaturahmi yang baik dengan mitra

5. Strategi kebudayaan, paradiplomasi yang sukses sangat bergantung pada hubungan positif antar mitra sehingga penting untuk menghargai budaya agar dapat membawa komunikasi yang efektif, dan menghasilkan kolaborasi yang baik
6. Publisitas, untuk memberikan informasi kepada perangkat Daerah dan publik tentang kegiatan kerja sama yang telah dilakukan.

## **2.4 Implementasi Kerja Sama *Sister cities* Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan UMKM Selama Masa Pandemi Covid-19**

### **2.4.1 Surabaya-Kitakyushu**

Berdasarkan Riwayat paradiplomasi Pemerintah Kota Surabaya yang telah dipaparkan diatas, Kota Surabaya telah menjalin kerja sama *sister city* dengan dua Kota di jepang yakni Kitakyushu dan Kochi. Kerja sama dengan Kitakyushu telah dimulah sejak tahun 1997 namun belum terdapat nota kesepahaman perjanjian yang mengikat diantara kedua Kota baik dalam bentuk LoI maupun MoU. Penandatanganan MoU yang sah atas kerja sama kedua Kota ini dilaksanakan pada 12 November 2012. Penandatanganan ini terjadi setelah 15 tahun terjalinnya kerja sama antara kedua Kota tersebut. Kerja sama tersebut dilaksanakan di bidang pembangunan lingkungan rendah karbon dan pengelolaan lingkungan

berkelanjutan. Fakta menariknya, Kerjasama yang terjalin dengan Kitakyushu merupakan kerjasama tematik yang difokuskan pada bidang lingkungan hidup.

Dalam mendukung pengembangan UMKM di tengah pandemi Covid-19, pada 29 Juni 2021 Kota Surabaya melakukan pengiriman kargo produk-produk UMKM lokal berbasis lingkungan ke Kitakyushu untuk diikutsertakan dalam pameran di Museum Lingkungan Hidup Kitakyushu. Pengiriman tersebut dilakukan untuk mempromosikan produk-produk UMKM di Kota mitra *sister city* Surabaya. Produk-Produk yang dikirimkan ke Kota Kitakyushu merupakan produk yang pembuatannya memanfaatkan bahan dari alam seperti eceng gondok, daun kering, kertas semen, dan lain-lain.<sup>71</sup> Dalam pengiriman produk tersebut, informasi kontak dari setiap UMKM juga diikutsertakan dalam bentuk kartu nama. Hal ini bertujuan agar memudahkan proses komunikasi antara penjual dan pembeli yang berasal dari Kitakyushu jika ingin memesan produk UMKM lokal Surabaya.

**Tabel 2.1 Produk-Produk UMKM Surabaya yang Dikirimkan ke Kitakyushu<sup>72</sup>**

No.	Nama UMKM	Jenis Produk
1.	Wiwit Collection	Tas dan pot dari eceng gondok
2.	Bengkel Kriya Daun	Kerajinan yang memanfaatkan daun kering

<sup>71</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 19 Desember 2023.

<sup>72</sup> Ibid.

3.	ESM Collection	Kerajinan yang memanfaatkan kertas semen
4.	Namira Ecoprint	Kain dan pakaian yang bermotif daun
5.	Putri Art	Kerajinan yang memanfaatkan kelobot jagung kering
6.	Sari Ronce	Udeng khas Surabaya
7.	Dian Dwi Jaya	Plakat

Sumber: Wawancara dengan Ibu Sasha Syaifani

#### 2.4.2 Surabaya-Seattle

Pemerintah Kota Surabaya memiliki aktivitas paradiplomasi pertama kalinya dengan Pemerintah Kota Seattle dalam bentuk kerja sama *sister city*. Kerja sama kedua Kota diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU sebagai landasan hukum yang mengikat untuk kedua kota. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada 27 September 1992 dengan bidang kerja sama yang meliputi manajemen perkotaan; manajemen pelabuhan; perlindungan lingkungan hidup; pendidikan; kesenian dan kebudayaan; ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan dunia usaha.<sup>73</sup>

Pengelolaan kerja sama *sister city* Surabaya-Seattle juga dibantu oleh *Surabaya-Seattle Sister city Association (SSSCA)*. SSSCA merupakan asosiasi yang

<sup>73</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 08 Desember 2023.

didirikan untuk memfasilitasi dan mempromosikan hubungan kerja sama antara Kota Surabaya dengan Seattle. Asosiasi ini merupakan wadah yang memiliki dasar hukum bagi masyarakat sipil dalam membantu proses pengimplementasian sistem manajemen *sister city* di kota-kota Amerika Serikat.<sup>74</sup> Selain itu, asosiasi ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan antara kedua Kota melalui pertukaran budaya, pendidikan, teknologi, bisnis, dan berbagai program lainnya. SSSCA berfungsi sebagai sebuah platform bagi warga Surabaya dan Seattle untuk berkolaborasi dan saling belajar satu sama lain dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang kebudayaan, kebiasaan, dan kepentingan masing-masing.

Kerja sama *sister city* antara Kota Surabaya dengan Kota Seattle telah berjalan lebih dari 30 tahun dengan melaksanakan berbagai program atau kegiatan kerja sama yang ditujukan untuk pembangunan Daerah. Walaupun dengan adanya pembatasan kegiatan hampir diseluruh aspek pada saat pandemi Covid-19, Kota Surabaya dan Seattle tetap menjalankan komunikasi dengan baik untuk menjaga hubungan yang telah dimulai pada tahun 1992. Selama masa pandemi Covid-19, hubungan surabaya- Seattle terus berjalan dengan melaksanakan berbagai program kerja sama.

Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan kerja sama *sister city* dengan Kota Seattle sebagai bentuk pemanfaatan paradiplomasi yang dimilikinya untuk mendorong pemulihan Kota dari pandemi dengan sejumlah program-program yang sesuai dengan bidang dalam kesepakatan MoU. Salah satu program yang dilakukan

---

<sup>74</sup> Mutia Zakia Salma, 2015, Analisis Peran Masyarakat Sipil Terhadap Efektivitas Dan Perkembangan Kerjasama Sister City: Sssca (Seattle – Surabaya Sister City Association) Dalam Lima Periode Implementasi Kerjasama, Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, hal. 4.

dalam kerja sama kedua Kota ini selama pandemi Covid-19 adalah dalam bidang pengembangan usaha.

Pada 1 Agustus 2022, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengiriman paket produk UMKM ke Kota Seattle melalui KJRI San Fransisco, Amerika Serikat.<sup>75</sup> Program pengembangan usaha dalam kerja sama *sister city* ini dilakukan dalam rangka mempromosikan produk-produk UMKM lokal Surabaya di luar negeri melalui mitra *sister city* Surabaya. produk-produk tersebut akan diikutsertakan dalam pameran yang ada di Kota Seattle. Dengan mengirimkan produk-produk UMKM lokal Surabaya ke mitra *sister city* seperti Kota Seattle, diharapkan dapat membawa keuntungan dalam mengembangkan pasar, meningkatkan visibilitas merek, dan mempererat hubungan perdagangan internasional. Dengan demikian, hasil kerja sama ini diharapkan dapat membawa peningkatan pendapatan dan pertumbuhan bisnis UMKM di Surabaya terlebih lagi pasca adanya pandemi Covid-19.

**Tabel 2.2 Produk-Produk UMKM Surabaya yang dikirimkan ke Seattle<sup>76</sup>**

No.	Nama UMKM	Jenis Produk
1.	Kartini	Tote Bag, <i>Ring Wallet</i>
2.	Yohanna by Iva Palupi	Aksesoris
3.	Titi Collection	<i>Scarf, Tie</i>

<sup>75</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya pada 08 Desember 2023.

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 19 Desember 2023.

4.	Filosofi	Sepatu
5.	Parvin	Tas, <i>Women Wallet</i>
6.	Parama	<i>Clutch</i>
7.	Rika Collection	Tas, Dompot

Sumber: Wawancara dengan Ibu Sasha Syaifani

Setelah produk-produk UMKM diterima oleh pihak KJRI San Fransisco, akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan *Surabaya-Seattle Sister city Association (SSSCA)*. Koordinasi ini terkait pada keperluan pengiriman dan pemanfaatan produk UMKM dengan pihak Pemerintah Kota Seattle yang akan diikutsertakan dalam pameran di Seattle. Namun, hingga kini produk-produk UMKM tersebut mengalami hambatan dalam pendistribusian barang menuju tempat pameran di Seattle karena terdapat keterbatasan anggaran, dan keterbatasan komunikasi karena perbedaan waktu yang sangat signifikan antara Kota Surabaya dengan Kota Seattle. Produk-produk UMKM Kota Surabaya tersebut masih berada di Kantor SSSCA dan belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait bentuk pemanfaatan produk yang ditujukan untuk promosi di Kota Seattle.<sup>77</sup>

Dalam kesepakatan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, produk-produk UMKM yang telah dikirimkan akan dipamerkan dalam suatu acara pameran yang diadakan setiap tahun di Seattle. Namun, dengan adanya keterbatasan jarak antara lokasi pameran dengan kantor SSSCA dan keterbatasan biaya, maka

<sup>77</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Rita Kartika Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya pada 18 Desember 2023.

pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan. Dengan produk-produk tersebut tersimpan di kantor SSSCA, setidaknya saat terjadi kunjungan di tempat tersebut, pengunjung dapat mendapatkan sedikit informasi mengenai produk-produk UMKM yang berasal dari Surabaya.<sup>78</sup>

#### 2.4.3 Surabaya-Gaziantep

Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerja sama internasional dengan kota-kota dari negara Turki dalam bentuk *sister city*. Kini, Surabaya memiliki kerja sama *sister city* dengan dua kota besar yang ada di Turki yakni Izmir dan Gaziantep. Kerjasama *sister city* Kota Surabaya-Gaziantep diawali dengan adanya proses peninjauan yang dilakukan pada 11 November 2019. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menerima undangan sebagai pembicara utama dalam *International Forum on Women in Lokal Governance* yang diselenggarakan oleh KBRI Ankara.

Perjalanan Wali Kota Surabaya ke Turki juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk membentuk kemitraan *sister city* dengan Kota Gaziantep. Selain itu, dasar dari kemitraan antara kedua kota ini adalah adanya kesamaan sebagai kota industri dengan pelestarian budaya serta potensi keuntungan yang dapat menguntungkan oleh keduanya.<sup>79</sup>

Pada 27 April 2021, kerja sama kedua kota disahkan dengan penandatanganan MoU yang mencakup bidang kerjasama seperti promosi budaya dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas sumber

---

<sup>78</sup> Wawancara penulis dengan Ibu Rita Kartika Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 18 Desember 2023.

<sup>79</sup> Fitria Nur Cholifah, 2023, Kerja Sama Sister city Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Gaziantep Dalam Inisiasi Pengembangan Ekonomi Lokal, Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hal.44.

daya manusia.<sup>80</sup> Walaupun terhitung sebagai kerja sama *sister city* terbaru yang dimiliki oleh Kota Surabaya, namun kerja sama ini telah berjalan cukup efektif dengan dilaksanakannya berbagai program atau kegiatan kerja sam di dalamnya,

Dalam meningkatkan praktik paradiplomasi ekonomi Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya untuk memulihkan perekonomian Kota dari pandemi melalui UMKM. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya bertugas untuk melakukan pendataan, kemitraan, dan perizinan produk UMKM sehingga akan mempermudah proses pengiriman ke Kota Gaziantep dalam perdagangan luar negeri.<sup>81</sup>

Pada tanggal 24 Desember 2021, Pemerintah Kota Surabaya mengirimkan produk-produk unggulan dari sembilan UMKM Kota Surabaya, termasuk produk fashion dan aksesoris. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk memanfaatkan paradiplomasi sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi dengan mempromosikan produk-produk UMKM dari Kota Surabaya di Kota Gaziantep.

**Tabel 2.3 Produk-Produk UMKM Surabaya yang dikirimkan ke Gaziantep<sup>82</sup>**

No.	Nama UMKM	Jenis Produk
1.	Kartini	<i>Tote Bag dan Ring Wallet</i>

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 19 Desember 2023.

<sup>81</sup> Fitria Nur Cholifah, 2023, Kerja Sama Sister city Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Gaziantep Dalam Inisiasi Pengembangan Ekonomi Lokal, Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hal.55.

<sup>82</sup> Ibid.

2.	ESM Collection	<i>Hand Fans</i>
3.	Yohana By Iva Palupi	<i>Accessories</i>
4.	Titi Collection	<i>Scarf dan Tie</i>
5.	Filosofi	<i>Boy and Girl Shoes</i>
6.	Parvin	<i>Marhen Bag, Woven Wallet, dan Bag Wallet</i>
7.	Parama	<i>Clutch</i>
8.	John Anglo	<i>Gantungan Kunci dan Dompet Cowo</i>
9.	Arara	<i>Bros</i>
10.	Namira Ecoprint	<i>Ecoprint Products</i>
11.	Mayka Indonesia	<i>Sharia Fashion</i>
12.	Putri Art	<i>Hiasan Kulkas dan Gorden</i>
13.	Dingklik by Ting Handycraft	<i>Mask dan Clutch</i>
14.	Zipr	<i>Bag</i>
15.	Chawaty Batik	<i>Bros, Udeng, dan Scarft</i>

Sumber: Penelitian Fitria Nur Cholifah

Dalam mempromosikan produk-produk UMKM Surabaya di Gaziantep, Pemerintah Kota Surabaya dibantu oleh Pemerintah Kota Gaziantep dengan menyediakan fasilitas pameran seni dan budaya yang dikenal sebagai Gazmex. Kerjasama ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan citra UMKM Surabaya di tingkat internasional dengan harapan akan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi perkembangan UMKM Surabaya.<sup>83</sup>

Meskipun demikian, hasil kerjasama ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pengembangan UMKM Kota Surabaya dari pandemi. Hal ini disebabkan oleh fokus kegiatan paradiplomasi yang masih baru antara Kota Surabaya dan Kota Gaziantep sehingga program kerja sama difokuskan pada strategi pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM agar dapat memasuki pasar global.<sup>84</sup> Untuk meningkatkan dampak kerjasama ini, Pemerintah Kota Surabaya dan Gaziantep telah merancang beberapa strategi, termasuk pertukaran katalog produk secara digital dan pengiriman produk tanpa biaya. Dengan demikian, diharapkan kerjasama yang telah terjalin akan memberikan dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang.

#### 2.4.4 Surabaya-Liverpool

Kerjasama *sister city* antara Kota Surabaya dengan Liverpool merupakan kerja sama *sister city* ketiga dengan mitra Kota yang berasal dari Kawasan Eropa. Kerjasama ini dimulai dari adanya kunjungan WaliKota Surabaya yakni Tri Rismaharini ke Kota Liverpool dalam rangka penandatanganan Letter of Intent

---

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid

(LoI) Kota Surabaya-Liverpool pada Mei 2017. Setelah penandatanganan LoI, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU pada 19 Maret 2018. Bidang yang dikerjasamakan diantara kedua Kota adalah bidang pengembangan ekonomi kreatif, manajemen pelabuhan, pengembangan Kota pintar, pengembangan kapasitas SDM.<sup>85</sup>

Selama pandemi Covid-19, kedua Kota ini secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama walaupun terdapat keterbatasan kondisi yang ada. Pada 10 November 2022, Kota Surabaya dan Liverpool melaksanakan pertemuan virtual dalam agenda pembahasan lebih lanjut mengenai penempatan produk UMKM Kota Surabaya ke Kota Liverpool yang dikirimkan pada 29 juli 2021. Produk-produk yang telah dikirimkan tersebut telah diikutsertakan dalam pameran yang bertempat di The Fashion Hub. The Fashion Hub merupakan co-creative space yang pendiriannya diprakarsai oleh mantan wakil waliKota Liverpool, yakni Mr. Gary Millar.

Namun pada tahun 2022, masa kontrak penggunaan bangunan The Fashion Hub telah berakhir sehingga kemudian dilaksanakan pembahasan lebih lanjut mengenai penempatan produk-produk UMKM Kota Surabaya. dalam upayanya, Pemerintah Kota Surabaya berencana untuk menggandeng KBRI London sebagai tempat untuk mempromosikan produk UMKM Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan atau festival Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI setiap tahunnya. Namun, perlu dilakukan diskusi dan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Kota

---

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 19 Desember 2023.

Surabaya, Pemerintah Kota Liverpool, St. Vincent's School, Mr. Gary Millar, dan KBRI London terkait pemindahan produk-produk UMKM tersebut.

Hingga tahun 2023, belum terdapat langkah lebih lanjut terkait pemindahan lokasi produk UMKM Surabaya karena belum disetujuinya perpanjangan MoU Kerjasama Surabaya-Liverpool. Pengiriman produk UMKM ini bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan lokal Surabaya dan memperkuat kerjasama antara kedua belah pihak. Selain itu, upaya paradiplomasi yang dilakukan oleh Surabaya-Liverpool ditujukan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Surabaya di tingkat internasional terutama pada saat pandemi Covid-19. Dengan demikian, diharapkan UMKM Kota Surabaya dapat berkembang setelah pasca pandemi Covid-19.

#### 2.4.5 Surabaya-Xiamen

Riwayat paradiplomasi Kota Surabaya menunjukkan bahwa selain menjalin kerja sama dengan Kota-Kota yang berada di Kawasan Eropa, Kota Surabaya juga menjalin kerja sama dengan kota-Kota di Kawasan Asia Timur. Selain menjalin kerja sama dengan kota-Kota di wilayah Jepang dan Korea Selatan, Kota Surabaya juga menjalin kerja sama dengan kota-Kota di Tiongkok. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama *sister city* dengan tiga Kota di Tiongkok yakni Guangzhou, Xiamen, dan Jiangmen. Program-program atau kegiatan yang dihasilkan dari kerja sama dengan Guangzhou dan Xiamen menjadi salah satu bentuk *best practices paradiplomacy* yang dimiliki Kota Surabaya.

Kota Surabaya menjalin kerja sama dengan Xiamen sejak 18 tahun lalu yang disahkan dengan penandatanganan MoU pada 23 Juni 2006. Bidang yang

dikerjasamakan meliputi ekonomi, perdagangan; IPTEK; pendidikan, olahraga dan budaya; dan Kesehatan. Selama pandemi Covid-19, kerja sama Surabaya-Xiamen terhitung cukup aktif dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan seperti pengiriman video paduan suara dari Kota Surabaya untuk acara pertunjukan persahabatan *sister city* di Xiamen yang dilaksanakan pada Desember 2021.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan program kerja sama di bidang ekonomi perdagangan, kedua Kota melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan bisnis melalui digital. Pada 14-29 Mei 2022, dilaksanakan program pelatihan bisnis digital dan budaya Tiongkok dari *Huaqiao University* sebagai bentuk Kerja sama Daerah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Xiamen, Tiongkok di masa Pandemi Covid-19.<sup>86</sup> Dalam kegiatan tersebut, melibatkan sejumlah *stakeholders* Kota Surabaya seperti:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Dinas Pendidikan
9. Bagian Hukum dan Kerjasama

---

<sup>86</sup> Wawancara Dengan Ibu Sasha Syaifani, S.Hub.Int Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 19 Desember 2023.

Pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut, terbagai kedalam lima topik pembahasan. Pada topik pertama, tema pelatihan berupa pengembangan *e-commerce* yang dilaksanakan pada 14-15 Mei 2022. Para pihak yang terlibat menerima pelatihan tentang pengembangan bisnis *e-commerce* di China selama 20 tahun terakhir. Dalam kegiatan ini, para *stakeholders* diberi pemahaman tentang bagaimana mengenali peluang industri dari perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok. Beberapa jenis peluang industri yang diajarkan seperti industri *E-Commerce*, *E-Payment*, *Business to Business*, JD. Com, VIP, Pinduoduo, Kaola, Taobao.com.<sup>87</sup>

Tema kedua dalam pelatihan ini berupa praktik dan kebijakan peradaban ekologi laut china yang dilaksanakan pada 21 Mei 2022. Dalam sesi ini, dilaksanakan *sharing section* pengalaman terkait pengembangan ekonomi China melalui praktik pengelolaan pesisir yang terintegrasi, khususnya dalam hal pembersihan dan pengembangan teluk yang komprehensif. Tema ketiga berupa pelatihan budaya dan Bahasa China yang dilaksanakan pada 22 Mei 2022 yang diberikan kepada para *stakeholders* Pemerintah Kota Surabaya yang tujuannya untuk mendukung dan memberikan kemudahan dalam proses kerja sama kedua kota dari segi bahasa.<sup>88</sup>

Dalam tema keempat membahas mengenai warisan dunia dengan dilakukannya *sharing* informasi terkait situs warisan dunia yang berada di Provinsi Fujian yang dilaksanakan pada 28 Mei 2022. Kegiatan terakhir dalam pelatihan ini

---

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Ibu Rita Kartika Staff Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya Pada 18 Desember 2023.

<sup>88</sup> Wawancara Penulis Dengan Bu Mega Pegawai Dinas Koperasi Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya Pada 23 April 2024.

adalah penyampaian informasi terkait penataan kota Xiamen yang dilaksanakan pada 29 Mei 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh *stakeholders* Pemerintah kota Surabaya.

